



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO



RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2022

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana Satpol PP diatur dalam Pasal 255 dan 256 tentang: “Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 65 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

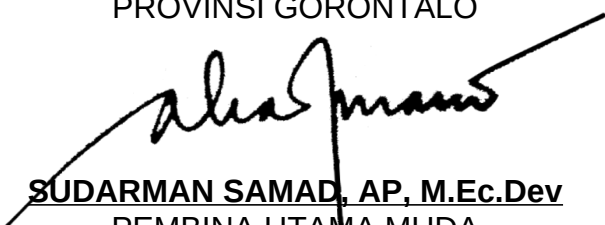
Berdasarkan Aturan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan berpedomana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Untuk mewujudkan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggungjawab yang dilakukan sebagai Aparat Pemerintah, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini kiranya menjadi Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD serta Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran sebagai bahan pembahasan RAPBD Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dengan DPRD.

Gorontalo, Juni 2021

KEPALA SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO



SUDARMAN SAMAD, AP, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197604101994121003



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN

Jln. Jendral Sudirman No. 52 Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Tlp (0435) 821277 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN KEBAKARAN

NOMOR : 029/ SPPPPMK / 08 / II / 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2021

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat & Kebakaran Tahun 2022, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENJA Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat & Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Nomor 4817);

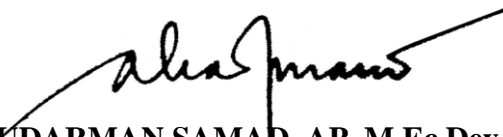
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaruasi Rancangan peraturan Daerah rentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, LINMAS & KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022;
 - b. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - c. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Gorontalo.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Februari 2021

KEPALA SATUAN


SUDARMAN SAMAD, AP, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197604101994121003

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran
Provinsi Gorontalo

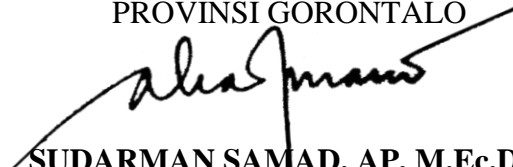
Nomor : 029/SPPPPMK/ 08 / II / 2021

Tanggal : 04 Februari 2021

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Sudarman Samad, AP, M.Ec.Dev	Kasat Pol PP, Linmas dan Kebakaran	Penanggung Jawab
2.	Ruly Lasulika, SE, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Marthen Soleman, S.STP	Kabid Penegakan Perda dan Tibumtram	Anggota
4.	Drs. Yusuf Mardani	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	Anggota
5.	Yola Killis, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6.	Mahmud Rizal Daipaha, S.STP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Hartini Utiahman, SH	Kasie Pelatihan dan Mobilisasi	Anggota
8.	Budiyanto Haluti, S.IP	Kasie PPNS	Anggota
9.	Rustam Lihimi, SH	Kasie Tibumtram	Anggota
10.	La Basir, S.Sos	Kasie Operasi Pengendalian	Anggota
11.	Jasmin Mohamad, S.IP	Kasie Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Meni S. Doda, S.Ip, MM	Kasie Bina Potensi Masyarakat	Anggota

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO


SUDARMAN SAMAD, AP, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197604101994121003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	36
3.3. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra.....	11
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.	18
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2022 Provinsi Gorontalo Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran.....	24
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Gorontalo.....	30
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju 2023 Provinsi Gorontalo.....	40
Tabel IV	Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.....	46
Tabel V	Kertas Kerja Penyesuaian Program dan Kegiatan pada RPJMD dan RENSTRA PD	52
Tabel VI	Pemetaan Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 Berdasarkan SIPD 2021.....	55
Tabel VII	Usulan Tambahan Rancangan Akhir Renja.....	60
Tabel VIII	Matriks Penajaman Rancangan Akhir RKPD Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Prov. Gorontalo Tahun 2022.....	65
Tabel IX	Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Satpol PP, Linmas & Kebakaran.....	69
Tabel X	Matriks Usulan Tambahan pada RKPD Tahun 2022.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang mana penyusunannya memperhatikan kewenangan lembaga dan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang agar tercipta keterpaduan Rancangan Rencana Kerja PD.

Sesuai amanat tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 ini merevisi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo tahun 2022 sesuai dengan arahan oleh Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo di mana untuk perencanaan Tahun 2022 agar menfokuskan kegiatan-kegiatan yang ada untuk penanganan Corona Virus Disease-19 serta dampak terhadap Corona. Menggerakan semua sumber daya negara untuk menyelamatkan kehidupan sosial-ekonomi.

Dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalisasikan Rancangan Akhir RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja,



Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum adalah memuat peraturan yang secara langsung terkait dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); dan (Lampiran Permendagri Nomor 41);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibum Linmas;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur (Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022;
- 23) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dimaksudkan untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang dalam peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya antara lain perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo diikuti dengan perubahan RKPD Provinsi Gorontalo yang menjadi rujukan dalam penyusunan RENJA-OPD sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran.
- b. Mewujudkan keinginan dan kepastian pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah dan Pembangunan antara lain mengawal dan Menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Meningkatkan Pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan dalam Lingkungan Masyarakat, serta mewujudkan Perlindungan Masyarakat.
 1. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo adalah :
 - a. Menjabarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;



- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangannya;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dan saling bersinergi dalam peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

BAB I :

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo Tahun 2022 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256 dan 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo antara lain peningkatan birokrasi dan kelembagaan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD.

1.4. Sitematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja OPD, serta garis besar dokumen.



BAB II :

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja OPD dan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Tahun 2022.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 38 Tahun 2007.

2. 3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD berdasarkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap kesesuaian Rancangan Akhir dengan RKPD,

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan kegiatan Forum OPD Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo yang kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai:

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan



BAB IV :
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V :
PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2020 terdiri dari 6 (Enam) Program dan 21 (Dua Satu) kegiatan, adalah sebagai berikut. :

Realisasi Program dan Kegiatan dan Capaian Kinerja :

1. Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP dengan target capaian 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.
 - Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP target capaian 73 Laporan dengan capaian kinerja 73 Laporan dengan Persentase capaian sebesar 100%.
 - Kegiatan Rakor Trantibum target capaian 50 Orang dengan capaian kinerja 0 Orang dengan Persentase capaian sebesar 0%
 - Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan Hari-hari Besar Keagamaan target capaian 6 Laporan dengan capaian kinerja 6 Laporan dengan Persentase capaian sebesar 100%.
 - Kegiatan Patroli Tempat-Tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit dan Rumah-rumah Jabatan target capaian 30 Laporan dengan capaian kinerja 30 Laporan dengan Persentase capaian sebesar 100%.
2. Program Penegakkan Perda dan Perkada serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah target capaian 35% dengan capaian kinerja sebesar 86.67%, capaian ini dengan kategori Baik.
 - Kegiatan Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah target capaian 10 kali dengan capaian kinerja 10 kali dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk Penyakit Masyarakat (PEKAT) target capaian 4 Laporan dengan capaian kinerja 4 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah target capaian 4 Laporan dengan capaian kinerja 3 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 60%.
 - Kegiatan Rapat Koordinasi PPNS target capaian 50 Orang dengan capaian kinerja 50 Orang dengan Persentase capaian sebesar 0%.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat target capaian 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.
 - Kegiatan Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Pengangguran, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) target capaian 4 Kegiatan dengan capaian kinerja 4 Kegiatan dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - Kegiatan Peningkatan Koordinasi dalam Membangun Kemitraan Perlindungan Masyarakat dengan Kab/Kota target capaian 100 Personil dengan capaian kinerja 0 Personil dengan Presentase capaian sebesar 0%.
 - Kegiatan Peringatan Dini/Deteksi Dini target capaian 8 Kalidengan capaian kinerja 8 Kali dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - Kegiatan Apel Siaga Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo target capaian 750 Orang dengan capaian kinerja 0 Orang dengan Presentase capaian sebesar 0%.
 - Kegiatan Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Linmas dan Kebakaran target capaian 50 Orang dengan capaian kinerja 50 Orang dengan Presentase capaian sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran target capaian 100%dengan capaian kinerja 100%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.
 - Kegiatan Fasilitas Bahaya Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya target capaian 24 Kejadian dengan capaian kinerja 24 Kejadian dengan Presentase capaian 100%.
5. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 75%, capaian ini dengan kategori Baik.
 - Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan target Kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesekretariatan target capaian 20 Orang dengan capaian kinerja 5 Orang dengan Persentase capaian sebesar 25%.
6. Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan target capaian 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian ini dengan kategori sangat baik.



- Kegiatan Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Keuangan target capaian 1 Dokumen dengan capaian kinerja 1 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- Kegiatan Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga target capaian 1 Dokumen dengan capaian kinerja 1 Dokumen dengan Persentase capaian sebesar 100%.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2019(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1					Urusan Pemerintahan									
1	1				Bidang Urusan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat									
1.05	4.01	09	30		Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100 %	188 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.05	4.01	09	30	01	Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Lap	70 Lap	73 Lap	73 Lap	100%	75 Lap	75 Lap	100%
1.05	4.01	09	30	02	Kegiatan Rakor Trantibum	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Org	50 Org	50 Org	0 Org	100%	50 Org	50 Org	100%
1.05	4.01	09	30	03	Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Lap	23 Lap	6 Lap	6 Lap	0%	8 Lap	8 Lap	100%
1.05	4.01	09	30	04	Kegiatan Patroli tempat-tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit, Rumah-rumah Jabatan	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	30 Lap	41 Lap	30 Lap	30 Lap	100%	30 Lap	30 Lap	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2019(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.05	4.01	09	31		Program Penegakkan Perda dan Perkada Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Presentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	45 %	106 %	35 %	35 %	100%	40 %	40 %	100%
1.05	4.01	09	31	01	Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,	Jumlah draft Perda/Pergub yang disusun/direvisi	1	Perda/Per gub						
1.05	4.01	09	31	01	Kegiatan Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pengawasan Perda/Pergub Provinsi	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	10 Kali	100%
1.05	4.01	09	31	02	Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk penyakit masyarakat (Pekat)	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	6 Lap	3 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	5 Lap	5 Lap	100%
1.05	4.01	09	31	03	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	4 Lap	5 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	100%
1.05	4.01	09	31	04	Kegiatan Rapat Koordinasi PPNS	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Org	50 Org	50 Org	0 Org	0%	50 Org	50 Org	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2019(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.05	4.01	09	32		Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	100 %	95 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.05	4.01	09	32	01	Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Pengangguran, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Keg	3 Keg	4 Keg	4 Keg	100%	4 Keg	4 Keg	100%
1.05	4.01	09	32	02	Peningkatan Koordinasi dalam membangun kemitraan Perlindungan Masyarakat dengan Kab/Kota	Jumlah Personil Satlinmas	100 Prsn	100 Prsn	100 Prsn	0 Prsnl	0%	100 Prsn	100 Prsnl	100%
1.05	4.01	09	32	03	Kegiatan Peringatan Dini/Deteksi Dini	Jumlah Deteksi Dini	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	100%	8 Kali	8 Kali	100%
1.05	4.01	09	32	04	Kegiatan Rapat Koordinasi pengamanan dan penanganan Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pemilu /Pemilukada	20 Org	20 Org						
1.05	4.01	09	32	05	Kegiatan Apel Siaga Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Org	750 Org	750 Org	0 Org	0%	750 Org	750 Org	100%
1.05	4.01	09	32	06	Kegiatan Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih - Kesemaptan - Bela Diri - Marcing Band	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100%	50 Org	50 Org	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2019(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.05	4.01	09	33		Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100 %	191 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.05	4.01	09	33	01	Kegiatan Fasilitasi bahaya bencana kebakaran dan bencana lainnya	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	92 Kejadian	24 Kejadian	24 Kejadian	100%	24 Kejadian	24 Kejadian	100%
1.05	4.01	09	33	02	Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Penyusunan/Revisi Peta Potensi Kerawanan Bencana	1 Dok	1 Dok						
4.01	4.01	09	01		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase Peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM	100 %	90 %	100 %	75 %	75%	100 %	100 %	100%
4.01	4.01	09	01	01	Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
4.01	4.01	09	01	08	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Ketersediaan Sarpras Kesekretariatan OPD	100 %	75 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
4.01	4.01	09	01	15	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesekretariatan	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Org	19 Org	20 Org	5 Org	25%	20 Org	20 Org	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2019(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
4.01	4.01	09	42		Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
4.01	4.01	09	42	01	Kegiatan Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
4.01	4.01	09	42	02	Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan lintas Kementerian/Lembaga	Jumlah Laporan Forum Komunikasi kab/kota dan Instansi terkait	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo yaitu sebagai berikut :

➤ Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat dan kebakaran untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

➤ Fungsi

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat;
2. Menyusun program pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur;
3. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman di daerah;
4. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran;



7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran; dan
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dalam perumusan kebijakan teknis, harus melaksanakan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melaksanakan penegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai dengan wewenangnya, pengawasan dilakukan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dilaksanakan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, badan hukum maupun masyarakat Tabel T-C.30 menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



Tabel T-C.30.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
Provinsi Gorontalo**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			73 Lap	75 Lap	75 Lap		73 Lap	75 Lap	75 Lap		
2	Jumlah Peserta Rakor Trantibum			50 Orang	50 Orang	50 Orang		0 Orang	50 Orang	50 Orang		
3	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan			6 Lap	8 Lap	8 Lap		6 Lap	8 Lap	8 Lap		
4	Jumlah Patroli, tertib ASN, dan Pam Obvit Aset Daerah	Jumlah warga Negara yang memperoleh akibat dari Penegakan Perda dan Perkada	Presentasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	30 Lap	30 Lap	30 Lap		30 Lap	30 Lap	30 Lap		
5	Jumlah Draft Perda/Pergub yang di susun/direvisi											
6	Jumlah Pengawasan Perda/Pergub Provinsi	Jumlah warga Negara yang memperoleh akibat dari Penegakan Perda dan Perkada	Presentasi Perda dan Perkada yang ditegakan	10 Kali	10 Kali	10 Kali		10 Kali	10 Kali	10 Kali		
7	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Jumlah warga Negara yang memperoleh akibat dari Penegakan Perda dan Perkada	Presentasi Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Lap	5 Lap	6 Lap		4 Lap	5 Lap	6 Lap		
8	Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub			4 Lap	4 Lap	4 Lap		4 Lap	4 Lap	4 Lap		
9	Jumlah Peserta Rakor PPNS			50 Org	50 Org	50 Org		0 Org	50 Org	50 Org		
10	Jumlah Operasi Penanganan PGOT			4 Keg	4 Keg	4 Keg		4 Keg	4 Keg	4 Keg		



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
11	Jumlah Personil Satlinmas			100 Personil	100 Personil	100 Personil		0 Personil	100 Personil	100 Personil		
12	Jumlah Deteksi Dini			8 Kali	8 Kali	8 Kali		8 Kali	8 Kali	8 Kali		
13	Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pemilu/Pemilukada											
14	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)			750 Org	750 Org	750 Org		0 Org	750 Org	750 Org		
15	Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih -Kesamaptaan -Bela Diri -Marching Band			50 Org	50 Org	50 Org		50 Org	50 Org	50 Org		
16	Jumlah Kejadian Kebakaran			24 Kejadian	24 Kejadian	24 Kejadian		24 Kejadian	24 Kejadian	24 Kejadian		
17	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
18	Presentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
19	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan			20 Org	20 Org	20 Org		5 Org	20 Org	20 Org		
20	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan			1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok		
21	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan instansi terkait			1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah menyangkut kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagaimana diamanatkan Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Pergub 65 Tahun 2016 kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja satuan polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan kebakaran provinsi gorontalo memiliki tugas yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP Provinsi Gorontalo dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dimaksud antara lain:

- 1) Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP :
 - Masih Belum ada permasalahan yang spesifik untuk program ini karena program ini mampu dijalankan semaksimal dengan kekuatan anggaran yang ada.
- 2) Program Penegakkan Perda dan Perkada Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah:
 - Masih Banyaknya Perda maupun perkada yang belum tersosialisasikan kepada masyarakat
 - Penengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum mampu memberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar.
 - Kurangnya Tenaga PPNS pada Satpol PP Provinsi Gorontalo
 - Belum terakomidir Indikator SPM dalam dokumen Renja dalam bentuk Program/Kegiatan, sehingga dalam penerapan pelayanan Trantibum masih menenmpel pada Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pen-yakit Masyarakat (PEKAT)



- 3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat:
 - Masih Banyaknya Pengemis, Gelandangan dan Orang terlantar.
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran
 - Tingkat Kebakaran yang terjadi di Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2020 meningkat
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
 - Masih minimnya Sumber daya Aparatur yang kompeten.
 - Kurangnya Sarana Kendaraan Operasional Mobil Patroli.
 - masih kurang Kualitas, kuantitas dan keterampilan SDM
 - Asuransi Keselamatan Kerja bagi Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo
- 6) Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Masih kurangnya data laporan masing-masing bidang
 - Masih kurang tenaga PNS yang membidangi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Bahwa pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022, prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Provinsi Gorontalo yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja OPD Tahun 2022. Untuk Rencana Kerja Tahun 2022 terdapat rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja 2022 mengingat bahwa ke 17 (Tujuh Belas) sub kegiatan sebagai sangat penting guna menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi secara maksimal.

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa



- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Renstra OPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 3 program yang terdiri dari 9 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Dari usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Provinsi Gorontalo :



Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2022
Provinsi Gorontalo
Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran

No	Rancangan Akhir RKPD 2022					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				10,377,934,098					
I	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100%	3,509,051,931	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100%	3,509,051,931
			Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	100%				Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	100%	
			Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	45%				Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	45%	
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	30 Laporan	3,176,210,855	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	30 Laporan	3,176,210,855
			Jumlah Deteksi Dini	8 Kali				Jumlah Deteksi Dini	8 Kali	
			Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	4 Laporan				Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	4 Laporan	
			Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Laporan				Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Laporan	
			Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Laporan				Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Laporan	
			Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Orang				Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Orang	
			Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Kegiatan				Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Kegiatan	
			Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Orang				Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Orang	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : Kesemaptaan, Bela Diri, Marching Band	50 Orang				Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : Kesemaptaan, Bela Diri, Marching Band	50 Orang	
			Jumlah Personil Satlinmas	100 Personil				Jumlah Personil Satlinmas	100 Personil	



No	Rancangan Akhir RKPD 2022					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Deteksi Dini	8 Kali	2,308,813,077	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Deteksi Dini	8 Kali	2,308,813,077
			Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	4 Laporan				Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	4 Laporan	
			Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	30 Laporan				Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	30 Laporan	
			Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Laporan				Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Laporan	
b.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Laporan	542,885,933	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Laporan	542,885,933
c.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Orang	15,639,371	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Orang	15,639,371
d.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Kegiatan	99,489,764	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Kegiatan	99,489,764
e.	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Orang	173,353,191	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Orang	173,353,191
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band	50 Orang				Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band	50 Orang	
f.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Personil Satlinmas	100 Personil	36,029,519	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Personil Satlinmas	100 Personil	36,029,576



No	Rancangan Akhir RKPD 2022					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	6 Laporan	292,098,527	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	6 Laporan	292,098,527
			Jumlah Pegawai Perda/Pergub Provinsi	10 Kali				Jumlah Pegawai Perda/Pergub Provinsi	10 Kali	
h.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Perda/Pergub Provinsi	10 Kali	60,624,835	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Perda/Pergub Provinsi	10 Kali	60,624,835
i.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	6 Laporan	231,473,692	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	6 Laporan	231,473,692
3	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Orang	40,742,549	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Orang	40,742,549
j.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Orang	40,742,549	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Orang	40,742,549
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	409,249,200	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	409,249,200
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	409,249,200	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	409,249,200
k.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	409,249,200	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	409,249,200



No	Rancangan Akhir RKPD 2022					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	6,459,632,967	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	7,668,268,665
			Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	100%				Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	100%	
5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	88,543,100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	88,543,100
			Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Dokumen				Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Dokumen	
m.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Dokumen	53,981,491	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Dokumen	53,981,491
n.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	34,561,609	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	34,561,609
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	4,744,767,484	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	4,744,767,484
o.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Biaya Gaji/Tunjangan ASN	14 Bulan	4,600,000,211	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Biaya Gaji/Tunjangan ASN	14 Bulan	4,600,000,211
p.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	144,767,273	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	144,767,273
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Orang	178,844,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Orang	720,929,698
q.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Orang	178,844,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Orang	720,879,698



No	Rancangan Akhir RKPD 2022					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	100%	724,957,864	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	100%	1,174,957,864
r.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	100%	724,957,864	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	100%	1,174,957,864
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	100%	722,520,519	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	100%	939,120,519
s.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	100%	722,520,519	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	100%	939,120,519
					10,377,934,098					11,586,569,796



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan kegiatan Forum OPD Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo yang kemudian diinput ke dalam aplikasi Simda Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan-usulan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut selanjutnya di evaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, diantaranya isu strategis mengenai Peredaran Minuman Keras.

Selanjutnya seluruh usulan program dan kegiatan program tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :



Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Gorontalo

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
I	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100%	
			Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	100%	
			Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	45%	
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	30 Laporan	
			Jumlah Deteksi Dini	8 Kali	
			Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	4 Laporan	
			Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Laporan	
			Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Laporan	
			Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Orang	
			Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Kegiatan	
			Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Orang	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : Kesemaptaan, Bela Diri, Marching Band	50 Orang	
			Jumlah Personil Satlinmas	100 Personil	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
a.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Deteksi Dini	8 Kali	
			Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	4 Laporan	
			Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	30 Laporan	
			Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Laporan	
b.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Laporan	
c.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Orang	
d.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Kegiatan	
e.	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Orang	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band	50 Orang	
f.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Keitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Personil Satlinmas	100 Personil	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	6 Laporan	
			Jumlah Pegawai Perda/Pergub Provinsi	10 Kali	
h.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Perda/Pergub Provinsi	10 Kali	
i.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	6 Laporan	
3	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Orang	
j.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Orang	
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	
k.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase Peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	
			Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	100%	
5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	
			Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Dokumen	
m.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Dokumen	
n.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	
o.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Biaya Gaji/Tunjangan ASN	14 Bulan	
p.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Orang	
q.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Orang	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	100%	
r.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	100%	
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	100%	
s.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	100%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan, maka arah dan kebijakan Renstra yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

➤ STRATEGI

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah:

1. Strategi : Meningkatkan intensitas patroli, pengawasan, dan koordinasi dengan instansi samping dan instansi terkait; (terpadu dan berkelanjutan);
2. Strategi: Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif atas pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Strategi: Antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana melalui peningkatan peran masyarakat.
4. Strategi: Mengupayakan peningkatan sarana prasarana dan pemeliharaan asset Satpol PP;
5. Strategi : Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja SDM.

➤ ARAH KEBIJAKAN.

1. Penetapan pola patroli, pengawasan dan koordinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang ada.

2. Kerjasama dan koordinasi dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan Kamtibmas dan Linmas.
3. Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.
4. Penyediaan Sarana Prasarana sesuai dengan standar pelayanan kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk membuka wawasan dan pola pikir, tindak, transparansi sesuai perkembangan sosial budaya.

Bertolak dari visi, misi Kepala Daerah dan tujuan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah diperlukan suatu rencana pembangunan yang handal, berkualitas dan kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah bahkan pembangunan Nasional, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam periode 2017 – 2022

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat

b. Sasaran Renja

Sasaran pokok Rencana Kerja yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tindak kriminal

3. 3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2022, Maka dirumuskan kedalam beberapa program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan yang sifatnya strategis dengan pagu indikatif sebesar Rp.**10,377,934,098.-** yang membiayai 3 Program, 9 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta



kewenangannya, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.509.051.931, yang membiayai 3 (Tiga) kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.176.210.855.-
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Paroli, Pengamanan dan Pengawasan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.2.308.813.077.-
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan pagu indikatif sebesar Rp.542.885.933.-
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.15.639.371.-
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu indikatif sebesar Rp.99.489.764.-
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dengan pagu indikatif sebesar Rp.173.353.191.-
 - Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.36.029.519.-
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp.292.098.527.-
 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp.60.624.835.-
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp.231.473.692.-
3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, dengan pagu indikatif sebesar Rp.40.742.549.-



B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini bertujuan untuk menangani terjadinya kebakaran rumah pemukiman warga, pertokoan atau kebakaran hutan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 409.249.200.- yang membiayai 1 (Satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp.409.249.200.-

- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp.409.249.200.-

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi Sarana Prasarana, kualitas Sumber Daya Aparatur yang ada, Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja OPD, serta penataan Sistem Pengadministrasian dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi secara regular sebagai wujud pemerintahan yang baik, dengan pagu indikatif sebesar Rp.6.459.632.967.- yang membiayai 5 (Lima) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan yaitu:

5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp.88.843.100.-

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp.53.981.491.-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp.34.561.609.-

6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.744.767.484.-

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.600.000.211.-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 144.767.273.-

7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.178.844.000.-



8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp.724.957.864.-

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 722.520.519.-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2022 diuraikan pada tabel T-C.33 berikut:



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
dan Perkiraan Maju 2023
Provinsi Gorontalo

NAMA PERANGAKAT DAERAH :SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Provinsi Gorontalo		10,377,934,098				6,977,934,098	SATPOL PP, LINMAS & KEBAKARAN
I	Program	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Provinsi Gorontalo	100%	3,509,051,931	APBD		100%	4,263,749,788	
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat		100%				100%		
		Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah		45%				45%		
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	Provinsi Gorontalo	30 Laporan	3,176,210,855			30 Laporan	3,812,855,637	
		Jumlah Deteksi Dini		8 Kali				8 Kali		
		Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub		4 Laporan				4 Laporan		
		Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		75 Laporan				75 Laporan		
		Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan		8 Laporan				8 Laporan		
		Jumlah Peserta Rakor Trantibum		50 Orang				50 Orang		
		Jumlah Operasi Penanganan PGOT		4 Kegiatan				4 Kegiatan		
		Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)		750 Orang				750 Orang		
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : Kesemaptan, Bela Diri, Marching Band		50 Orang				50 Orang		
		Jumlah Personil Satlinmas		100 Personil				100 Personil		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Deteksi Dini	Provinsi Gorontalo	8 Kali	2,308,813,077			8 Kali	2,748,813,226	
		Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub		4 Laporan				4 Laporan		
		Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah		30 Laporan				30 Laporan		
		Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		75 Laporan				75 Laporan		
b.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	Provinsi Gorontalo	8 Laporan	542,885,933			8 Laporan	582,885,933	
c.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	Provinsi Gorontalo	50 Orang	15,639,371			50 Orang	35,639,414	
d.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	Provinsi Gorontalo	4 Kegiatan	99,489,764			4 Kegiatan	109,490,422	
e.	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernaung Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	Provinsi Gorontalo	750 Orang	173,353,191			750 Orang	253,353,191	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptan - Bela Diri - Marching Band		50 Orang				50 Orang		
f.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Keitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Personil Satlinmas	Provinsi Gorontalo	100 Personil	36,029,519			100 Personil	54,874,373	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Provinsi Gorontalo	6 Laporan	292,098,527			6 Laporan	394,299,528	
		Jumlah Pegawasan Perda/Pergub Provinsi		10 Kali				10 Kali		
h.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pegawasan Perda/Pergub Provinsi	Provinsi Gorontalo	10 Kali	60,624,835			10 Kali	80,624,080	
i.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Provinsi Gorontalo	6 Laporan	231,473,692			6 Laporan	313,674,539	
3.	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Peserta Rakor PPNS	Provinsi Gorontalo	50 Orang	40,742,768			50 Orang	56,594,623	
j.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Rakor PPNS	Provinsi Gorontalo	50 Orang	40,742,549			50 Orang	56,594,623	
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	Provinsi Gorontalo	100%	409,249,200	APBD		100%	509,249,539	
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	Provinsi Gorontalo	24 Kejadian	409,249,200			24 Kejadian	509,249,539	
k.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, ANtar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	Provinsi Gorontalo	24 Kejadian	409,249,200			24 Kejadian	509,249,539	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	Provinsi Gorontalo	100%	6,459,632,967	APBD		100%	6,959,683,973	
		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan		100%				100%		
5.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	88,543,100			1 Dokumen	108,542,819	
		Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait		1 Dokumen				1 Dokumen		
m.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	1 Dokumen	53,981,491			1 Dokumen	63,981,721	
n.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	34,561,609			1 Dokumen	44,561,098	
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	1 Dokumen	4,744,767,484			1 Dokumen	4,754,749,202	
o.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biaya Gaji/Tunjangan ASN	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	14 Bulan	4,600,000,211				4,600,000,211	
p.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	1 Dokumen	144,767,273			1 Dokumen	154,748,919	
7.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	20 Orang	178,844,000			20 Orang	278,894,000	
q.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	20 Orang	178,844,000			20 Orang	278,894,000	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	100%	724,957,864			100%	840,228,494	
r.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	100%	724,957,864			100%	840,228,494	
9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	100%	722,520,519			100%	822,520,539	
s.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	100%	722,520,519			100%	822,520,539	
					10,377,934,098				11,732,683,300	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Sejalan dengan Misi Lima Provinsi Gorontalo, Terciptanya Pemerintah yang baik dan Melayani, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2022 terdiri atas 3 (Enam) program dan 9 (Sembilan) kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 10.377.934.098,00. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel IV sebagai berikut :



Tabel IV
Rencana Pendanaan Perangkat Daerah
Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
Provinsi Gorontalo

SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Provinsi Gorontalo		10,377,934,098		SATPOL PP, LINMAS & KEBAKARAN
I	Program	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	100%	3,509,051,931	APBD	
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat		100%			
		Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah		45%			
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	Provinsi Gorontalo	30 Laporan	3,176,210,855		
		Jumlah Deteksi Dini		8 Kali			
		Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub		4 Laporan			
		Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		75 Laporan			
		Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan		8 Laporan			
		Jumlah Peserta Rakor Trantibum		50 Orang			
		Jumlah Operasi Penanganan PGOT		4 Kegiatan			
		Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)		750 Orang			
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : Kesemaptaaan, Bela Diri, Marching Band		50 Orang			
		Jumlah Personil Satlinmas		100 Personil			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Deteksi Dini	Provinsi Gorontalo	8 Kali	2,308,813,077		
		Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub		4 Laporan			
		Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah		30 Laporan			
		Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		75 Laporan			
b.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	Provinsi Gorontalo	8 Laporan	542,885,933		
c.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	Provinsi Gorontalo	50 Orang	15,639,371		
d.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	Provinsi Gorontalo	4 Kegiatan	99,489,764		
e.	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	Provinsi Gorontalo	750 Orang	173,353,191		
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band		50 Orang			
f.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Keitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Personil Satlinmas	Provinsi Gorontalo	100 Personil	36,029,519		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Provinsi Gorontalo	6 Laporan	292,098,527		
		Jumlah Pegawai Perda/Pergub Provinsi		10 Kali			
h.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pegawai Perda/Pergub Provinsi	Provinsi Gorontalo	10 Kali	60,624,835		
i.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Provinsi Gorontalo	6 Laporan	231,473,692		
3.	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Peserta Rakor PPNS	Provinsi Gorontalo	50 Orang	40,742,549		
j.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Rakor PPNS	Provinsi Gorontalo	50 Orang	40,742,549		
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	Provinsi Gorontalo	100%	409,249,200	APBD	
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	Provinsi Gorontalo	24 Kejadian	409,249,200		
k.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	Provinsi Gorontalo	24 Kejadian	409,249,200		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	Provinsi Gorontalo	100%	6,459,632,967	APBD	
		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan		100%			
5.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	88,543,100		
		Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait		1 Dokumen			
m.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	1 Dokumen	53,981,491		
n.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	34,561,609		
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	1 Dokumen	4,744,767,484		
o.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biaya Gaji/Tunjangan ASN	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	14 Bulan	4,600,000,211		
o.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	1 Dokumen	144,767,273		
7.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	20 Orang	178,844,000		
p.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	20 Orang	178,844,000		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	100%	724,957,864		
q.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	100%	724,957,864		
9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	100%	722,520,519		
r.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkatoran	Satpol PP, Linmas & Kebakaran	100%	722,520,519		
					10,377,934,098		



BAB V

PENUTUP

4. 1. Catatan penting yang mendapatkan perhatian

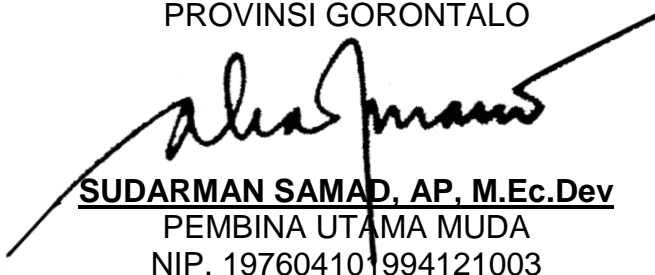
Didalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk Tahun 2022 ini, ada beberapa kegiatan yang anggaran belanjanya ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan karena dianggap urgen atau penting sehubungan dengan peningkatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

4. 2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan satuan anggaran yang tersedia serta aturan–aturan yang berlaku atau berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Demikian RENJA Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk bisa dijadikan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Atas segala kekurangan dalam hal penyajian penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Atas saran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, Juni 2021

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYAKAT
DAN KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO



SUDARMAN SAMAD, AP, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197604101994121003



TABEL V
KERTAS KERJA
PENYESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RPJMD DAN RENSTRA PD

PROVINSI :PROV.GORONTALO
PERANGKAT DAERAH : SATPOL PP, LINMAS & KEBAKARAN

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR KEGIATAN RENSTRA	PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET / SATUAN	KEGIATAN RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET / SATUAN	SUB KEGIATAN RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN	TARGET / SATUAN	PAGU SU KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100%	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	30 Laporan	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	8 Kali	2,308,813,226	Dalam Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terdapat 10 Indikator Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Peringatan Dini/Deteksi Dini	Jumlah Deteksi Dini					Jumlah Deteksi Dini	8 Kali		Jumlah Deteksi Dini	4 Laporan		
		Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahSerta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Menurunny tingkat pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub					Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	4 Laporan		Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	30 Laporan		
		Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP					Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Laporan		Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75 Laporan		
		Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan					Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Laporan	2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	8 Laporan	542,885,933	
		Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Rakor Trantibum	Jumlah Peserta Rakor Trantibum					Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Orang	3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	50 Orang	15,639,414	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Pengangguran, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Jumlah Operasi Penanganan PGOT		Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	100%		Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Kegiatan	4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	4 Kegiatan	99,490,422	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Apel Siaga Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)					Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Orang	5. Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernausa Hak Asasi Manuasia	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	750 Orang	173,353,191	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band					Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band	50 Orang		Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band	50 Orang		



NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR KEGIATAN RENSTRA	PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET / SATUAN	KEGIATAN RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET / SATUAN	SUB KEGIATAN RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN	TARGET / SATUAN	PAGU SU KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Koordinasi dalam membangun Kemitraan Perlindungan Masyarakat dengan Kab/Kota	Jumlah Personil Satlinmas					Jumlah Personil Satlinmas	100 Personil	6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Personil Satlinmas	100 Personil	36,029,576	
		Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahSerta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pengawasan Perda/Pergub Provinsi	Program Penegakkan Perda dan Perkada Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase tingkat pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	45%	2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pegawai Perda/ Pergub Provinsi	6 Laporan	1. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pegawai Perda/ Pergub Provinsi	10 Kali	60,624,989	Dalam Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur terdapat 2
		Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahSerta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah		Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk penyakit masyarakat (Pekat)	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Program Penegakkan Perda dan Perkada Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah				Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	10 Kali	2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	6 Laporan	231,473,617	Indikator Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
		Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahSerta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah		Rapat Koordinasi PPNS	Jumlah Peserta Rakor PPNS	Program Penegakkan Perda dan Perkada Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah			3. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Orang	1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Rakor PPNS	50 Orang	40,742,768	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	Fasilitasi bahaya bencana kebakaran dan bencana lainnya	Jumlah Kejadian Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	1. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, ANtar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	24 Kejadian	409,249,539	
		Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan lintas Kementerian/Lembaga Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Dokumen	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Dokumen	53,981,721	Dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	34,561,098	Kinerja Perangkat Daerah terdapat
													Biaya Gaji/Tunjangan ASN	14 Bulan	4,600,000,211	
		Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesekretariatan	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Orang	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	20 Orang	178,894,000	



NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR KEGIATAN RENSTRA	PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET / SATUAN	KEGIATAN RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET / SATUAN	SUB KEGIATAN RKPD 2022	INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN	TARGET / SATUAN	PAGU SU KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	100%	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	100%	724,925,146	
		Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	pelayanan jasa administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur			9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	722,520,539	
															10,377,934,098	



TABEL VI
PEMETAAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020
DAN PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006
BERDASARKAN SIPD TAHUN 2021

SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020			Target	Pagu Anggaran 2022
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP				100%	2,764,665,568
	Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP,	Jumlah Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	75 Laporan	2,152,901,406
	Kegiatan Rakor Trantibum	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	50 Orang	15,639,414
	Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-Hari Keagamaan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	8 Laporan	542,885,933



No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020			Target	Pagu Anggaran 2022
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Patroli tempat-tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit, Rumah-rumah Jabatan	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	30 Laporan	53,238,815
2	Program	Persentase tingkat pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah				45%	392,993,279
	Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah.						
	Kegiatan Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pengawasan Perda/Pergub Provinsi Gorontalo	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10 Kali	60,624,989
	Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk penyakit masyarakat (Pekat)	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6 Laporan	231,473,617
	Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Laporan	60,151,905
	Rapat Koordinasi PPNS	Jumlah Peserta Rakor PPNS	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	50 Orang	40,742,768



No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020			Target	Pagu Anggaran 2022
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat.	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat.				100%	351,394,289
	Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Pengangguran, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	99,490,422
	Peningkatan Koordinasi dalam membangun Kemitraan Perlindungan Masyarakat dengan Kab/Kota	Jumlah Personil Satlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100 Personil	36,029,576
	Peringatan Dini/Deteksi Dini	Jumlah Deteksi Dini	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	8 Kali	42,521,100
	Apel Siaga Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	750 Orang	25,507,024



No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020			Target	Pagu Anggaran 2022
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : Kesemampuan Bela Diri Marching Band	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	50 Orang	147,846,167
4	Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan pemadam kebakaran				100%	409,249,539
	Kegiatan Fasilitasi bahaya bencana kebakaran dan bencana lainnya	Jumlah Kejadian Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Kejadian	409,249,539
5	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur				100%	1,626,339,685
	Kegiatan pelayanan jasa administrasi perkantoran	Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	722,520,539
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase ketersediaan Sarpras Kesekretariatan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	724,925,146
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesekretariatan	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	178,844,000



No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020			Target	Pagu Anggaran 2022
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				100%	233,291,738
	Kegiatan Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	34,561,098
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Dokumen	144,748,919
	Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan lintas Kementerian/Lembaga	Jumlah Laporan Forum komunikasi kab/kota dan instansi terkait	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	53,981,721
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Dokumen	4,600,000,211
T O T A L							10,377,934,098



TABEL VII
USULAN TAMBAHAN
RANCANGAN AWAL RENJA
SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022

No.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	20	Orang	231,635,698	
			Diklat Dasar Satpol PP	30	Orang	125,975,153	
			Perlengkapan Peserta	30	Orang	6,000,000	@ 200.000
			Tinta, Toner, Bahan Printer	1	Keg/Tahun	1,000,000	@ 1.000.000
			Kertas Plano	10	Rol	500,000	@ 50.000
			Bahan Obat-Obatan	1	Keg	5,000,000	@ 5.000.000
			Bahan Obat-Obatan Lainnya	50	Btl	1,500,000	Handysanitizer @ 30.000
			Jasa Narasumber	1	Kegiatan	5,000,000	Jasa Tenaga Kesehatan (4 org x 6 Hari) Rp. 5.000.000



No.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Belanja Cetak	1	Kegiatan	432,186	Cetak Sertifikat Diklat/Oplah s.d 200 Halaman (1 Rim x 1 kali) Rp. 432.186
				5	Halaman	360,930	Cetak Cover Laporan (5 eks x 1 Hal) Rp. 72.186
			Penggandaan Kertas	10000	Halaman	4,330,000	Penggandaan/Fotocopy Administrasi Surat dan Laporan (1 Keg x 10.000 Hal) Rp. 433
				10500	Halaman	4,553,108	Penggandaan Buku Panduan dan Materi Peserta (30 org x 350 Hal) Rp. 433
			Belanja Penjilidan	30	Eksemplar	451,170	Penjilidan Materi Diklat (30 org x 1 eks) Rp. 15.039
				5	Eksemplar	90,235	Penjilidan Laporan (5 eks x 1 Hal) Rp. 18.047
			Belanja Cetak Bali-ho/Poster/Banner/Spanduk	24	Meter	1,082,784	(4 Lembar x 1 Meter x 6 Meter) Rp. 45.116
			Makanan dan Minuman Rapat	75	Orang/Kali	840,000	Makanan Ringan Rapat Biasa > 2 Jam (15 org x 5 kali) Rp. 14.000
				75	Orang/Kali	2,640,000	Makanan Berat Rapat Biasa > 4 Jam (15 org x 5 kali) Rp. 44.000
			Makanan dan Minuman Tamu	24	Orang/Kali	1,500,000	(8 org x 3 kali) Rp. 125.000



No.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16	Orang/Hari	16,520,000	Koordinasi Kegiatan di Kab/Kota (4 org x 2 hari x 2 kali)
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	6	Orang/Hari	18,808,000	Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan di Jakarta (2 org x 3 hari x 1 kali)
			Bahan Baku Pakaian	45	Orang/Kali	6,496,740	Pakaian Olahraga Peserta, Instruktur (Celana, Luis Sport, Kaos) 45 org x 1 Keg x Rp. 144.372
				45	Orang/Kali	45,000,000	Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian, Topi, Sepatu) 45 org x 1 Keg x Rp. 1.000.000
			Diklat Dasar Damkar	30	Orang	105,660,545	
			Perlengkapan Peserta	30	Orang	6,000,000	@ 200.000
			Tinta, Toner, Bahan Printer	1	Keg/Tahun	1,000,000	@ 1.000.000
			Kertas Plano	10	Rol	500,000	@ 50.000
			Bahan Obat-Obatan	1	Keg	5,000,000	@ 5.000.000
			Bahan Obat-Obatan Lainnya	50	Btl	1,500,000	Handysanitizer @ 30.000



No.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Jasa Narasumber	1	Kegiatan	5,000,000	Jasa Tenaga Kesehatan (4 org x 6 Hari) Rp. 5.000.000
			Belanja Cetak	1	Kegiatan	432,186	Cetak Sertifikat Diklat/Oplah s.d 200 Halaman (1 Rim x 1 kali) Rp. 432.186
				5	Halaman	360,930	Cetak Cover Laporan (5 eks x 1 Hal) Rp. 72.186
			Penggandaan Kertas	10000	Halaman	4,330,000	Penggandaan/Fotocopy Administrasi Surat dan Laporan (1 Keg x 10.000 Hal) Rp. 433
				10500	Halaman	4,546,500	Penggandaan Buku Panduan dan Materi Peserta (30 org x 350 Hal) Rp. 433
			Belanja Penjilidan	30	Eksemplar	451,170	Penjilidan Materi Diklat (30 org x 1 eks) Rp. 15.039
				5	Eksemplar	90,235	Penjilidan Laporan (5 eks x 1 Hal) Rp. 18.047
			Belanja Cetak Bali-ho/Poster/Banner/Spanduk	24	Meter	1,082,784	(4 Lembar x 1 Meter x 6 Meter) Rp. 45.116
			Makanan dan Minuman Rapat	75	Orang/Kali	1,050,000	Makanan Ringan Rapat Biasa > 2 Jam (15 org x 5 kali) Rp. 14.000
				75	Orang/Kali	3,300,000	Makanan Berat Rapat Biasa > 4 Jam (15 org x 5 kali) Rp. 44.000
			Makanan dan Minuman Tamu	24	Orang/Kali	3,000,000	(8 org x 3 kali) Rp. 125.000



No.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16	Orang/Hari	16,520,000	Koordinasi Kegiatan di Kab/Kota (4 org x 2 hari x 2 kali)
			Bahan Baku Pakaian	45	Orang/Kali	6,496,740	Pakaian Olahraga Peserta, Instruktur (Celana, Luis Sport, Kaos)45 org x 1 Keg x Rp. 144.372
				45	Orang/Kali	45,000,000	Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian, Topi, Sepatu) 45 org x 1 Keg x Rp. 1.000.000
TOTAL						231,635,698	



TABEL VIII
MATRIKS PENAJAMAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2022
SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Berdasarkan Kepemendagri 050-3708)		Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Ranking	Keterangan
				Pagu Tahun 2021	Usulan Prioritas (Pagu SIPD)	Pagu Total Usulan	Usulan Tambahan (6-5)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Rp 6,516,879,422	Rp 1,859,632,756	Rp 3,068,268,454	Rp 1,208,635,698		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 54,166,718	Rp 88,543,100	Rp 88,543,100			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait		Rp 19,805,816	Rp 53,981,491	Rp 53,981,491			
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan		Rp 34,360,902	Rp 34,561,609	Rp 34,561,609			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 4,674,087,884	Rp 4,744,767,484	Rp 4,744,767,484			
c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biaya Gaji/Tunjangan ASN		Rp 4,600,000,474	Rp 4,600,000,211	Rp 4,600,000,211			
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan		Rp 74,087,410	Rp 144,767,273	Rp 144,767,273			
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 167,620,000	Rp 178,844,000	Rp 720,879,698	Rp 542,035,698		
d	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan		Rp 167,620,000	Rp 178,844,000	Rp 720,879,698	Rp 542,035,698	Prioritas 1	- Diklat Dasar Sat-pol PP - Diklat Dasar Damkar



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Berdasarkan Kepemendagri 050-3708)	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Ranking	Keterangan
			Pagu Tahun 2021	Usulan Prioritas (Pagu SIPD)	Pagu Total Usulan	Usulan Tambahan (6-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 906,966,949	Rp 724,957,864	Rp 1,174,957,864	Rp 450,000,000		
e	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD	Rp 906,966,949	Rp 724,957,864	Rp 1,174,957,864	Rp 450,000,000	Prioritas 2	1 Unit Kendaraan Roda Empat (Patroli)
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 714,037,871	Rp 722,520,519	Rp 939,120,519	Rp 216,600,000		
f	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkatoran	Rp 714,037,871	Rp 722,520,519	Rp 939,120,519	Rp 216,600,000	Prioritas 3	Asuransi Keselamatan Kerja (190 x 12 bulan x Rp. 95.000)
II	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp 3,462,005,986	Rp 3,509,051,931	Rp 3,509,051,931			
6	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Rp 3,156,312,725	Rp 3,176,210,855	Rp 3,176,210,855			
g	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Deteksi Dini	Rp 2,310,070,484	Rp 2,308,813,077	Rp 2,308,813,077			
		Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub						
		Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah						
		Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
h	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	Rp 542,885,933	Rp 542,885,933	Rp 542,885,933			



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Berdasarkan Kepemendagri 050-3708)	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Ranking	Keterangan
			Pagu Tahun 2021	Usulan Prioritas (Pagu SIPD)	Pagu Total Usulan	Usulan Tambahan (6-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	Rp 15,639,540	Rp 15,639,371	Rp 15,639,371			
j	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	Rp 87,162,480	Rp 99,489,764	Rp 99,489,764			
k	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	Rp 173,353,191	Rp 173,353,191	Rp 173,353,191			
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band						
l	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Personil Satlinmas	Rp 27,201,097	Rp 36,029,519	Rp 36,029,519			
7	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Rp 269,098,638	Rp 292,098,527	Rp 292,098,527			
m	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pengawasan Perda/Pergub Provinsi	Rp 60,624,989	Rp 60,624,835	Rp 60,624,835			
n	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Rp 208,473,649	Rp 231,473,692	Rp 231,473,692			
8	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Rp 36,594,623	Rp 40,742,549	Rp 40,742,549			
o	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Rakor PPNS	Rp 36,594,623	Rp 40,742,549	Rp 40,742,549			



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Berdasarkan Kepemendagri 050-3708)	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Ranking	Keterangan
			Pagu Tahun 2021	Usulan Prioritas (Pagu SIPD)	Pagu Total Usulan	Usulan Tambahan (6-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Rp 399,049,164	Rp 409,249,200	Rp 409,249,200			
9	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Rp 399,049,164	Rp 409,249,200	Rp 409,249,200			
p	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	Rp 399,049,164	Rp 409,249,200	Rp 409,249,200			
J U M L A H			Rp 10,377,934,572	Rp 10,377,934,098	Rp 11,586,569,796	Rp 1,208,635,698		

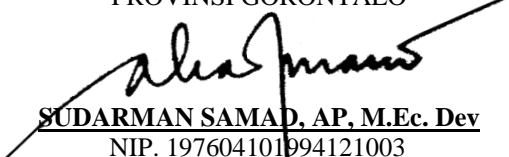


TABEL IX
Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Satpol PP, Linmas & Kebakaran
Provinsi Gorontalo

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	✓			
2	Pengolahan data dan informasi	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		✓	Tidak ada usulan dari masyarakat	Melakukan Rapat Forum dengan Satpol PP Kab/Kota serta melibatkan tokoh masyarakat
9	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	✓			

Gorontalo, Juni 2021

KASAT POL PP, LINMAS & KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO


SUDARMAN SAMAD, AP, M.Ec. Dev
NIP. 197604101994121003

MATRIKS USULAN TAMBAHAN
PADA RKPD TAHUN 2022

OPD : DINAS SATPOL PP LINMAS DAN KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO

Ranking	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Berdasarkan Kepemendagri 050-3708)	Indikator Kinerja	Pagu Total 2021 (Rp)	Usulan Prioritas Pagu Inputan SIPD (Rp)	Usulan Tambahan (Rp)				Pagu Total 2022 (Rp)	SELISIH SIPD 2021 & 2022	Keterangan (Item Belanja Usulan Tambahan)
					Belanja Operasi (Pegawai)	Belanja Operasi (Barang Jasa)	Belanja Modal	Pagu Total Usulan			
	DINAS SATPOL PP LINMAS DAN KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO					231,635,698	-	231,635,698		-	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan				231,635,698		231,635,698			
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan				231,635,698		231,635,698			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan				231,635,698		231,635,698			SIPD